

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal tersebut disebabkan karena lembaga keuangan memberikan fasilitas dalam bidang keuangan serta memutar arus uang di dalam perekonomian. Keberadaan lembaga keuangan menjadi sarana yang efektif untuk menangani berbagai kebutuhan finansial di masyarakat, baik dengan menampung dana maupun memberikan fasilitas berupa pinjaman. Dengan demikian, lembaga keuangan berperan signifikan dalam mendukung dan memperlancar proses pembangunan ekonomi suatu wilayah kedepannya. Pada umumnya, tugas lembaga keuangan mencakup proses pengumpulan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Semua lembaga yang beroperasi dalam sektor keuangan memiliki peran penting serta manfaat yang signifikan bagi perekonomian dan masyarakat secara luas. Lembaga keuangan memiliki peran menjadi perantara dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Provinsi Bali merupakan provinsi yang terkenal dengan adat istiadat yang diatur oleh desa adat tentunya memiliki hak otonom untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonominya, termasuk mengatur pengelolaan kekayaan desa. Salah satu keunikan tersebut adalah adanya Lembaga Pengkreditan Desa (LPD). LPD di Bali mulai berkembang sejak tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali No. 972 tahun 1984. Berdasarkan Peraturan Daerah

(Perda) Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang LPD, bahwa untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan desa adat dengan segala aspeknya, dipandang perlu mengadakan usaha-usaha dalam memperkuat keuangan Desa, sebagai sarana penunjang melalui pendirian suatu badan usaha milik desa berupa LPD yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.

Tujuan pendirian LPD yaitu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif, memberantas sistem ijon dan gadai gelap yang bisa disamakan dengan itu di daerah pedesaan, menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi warga pedesaan, menciptakan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa. Fungsi utama LPD melibatkan manajemen dan pengembangan sumber daya keuangan dalam lingkup Desa Pakraman. Dengan demikian, LPD memiliki peran strategis dalam mengelola aspek-aspek keuangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi di Desa Adat Pakraman tersebut.

LPD juga merupakan lembaga milik Desa Pakraman yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya, melihat hal tersebut, perlu ditingkatkan kinerja serta dilestarikan keberadaanya (Suartana, 2009). LPD merupakan lembaga keuangan desa yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, dimana LPD menawarkan produk jasa melalui tabungan, deposito dan pinjaman dari masyarakat yang nantinya disalurkan dalam bentuk pemberian kredit yang efektif. LPD memberikan pelayanan bagi masyarakat desa di wilayah tempat LPD tersebut beroperasi. Sedangkan dari segi pelayanan LPD memiliki proses yang singkat, prosedur yang sederhana, pendekatan personal serta pelayanan yang mudah diakses karena LPD beroperasi di desa-desa maka dekat dengan lokasi

tempat tinggal masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu faktor keberhasilan LPD dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat Desa sehingga memiliki rasa aman untuk menyimpan serta meminjam uang di LPD.

Kedekatan budaya dan psikologi antara pegawai LPD dengan nasabah serta karakter bisnis yang dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif terhadap perubahan lingkungan, dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan merupakan kekuatan dan salah satu faktor yang nantinya akan mempengaruhi kinerja LPD sebagai lembaga keuangan mikro agar tetap bertahan dan berdaya saing dengan lembaga keuangan yang sejenis. Selain memiliki fungsi ekonomi, LPD juga memiliki peran sosial yang cukup signifikan. Dimana sebagian keuntungan yang diperoleh LPD digunakan untuk kegiatan sosial dan pembangunan desa, termasuk mendukung kegiatan keagamaan dan membantu pembangunan infrastruktur desa tempat LPD tersebut beroperasi.

Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro yang berkembang di wilayah *desa pakraman*, dalam operasionalnya LPD hanya fokus melayani masyarakat di wilayah *desa pakraman* tempat LPD tersebut beroperasi. Perkembangan LPD di Bali saat ini cukup pesat, hampir setiap Desa Adat/*Pakraman* yang ada di Bali telah memiliki LPD. Sejak awal berdirinya LPD pada tahun 1984 jumlah LPD hanya 8 unit yang tersebar di delapan kabupaten/kota yang ada di Bali. Namun pada tahun 2023 jumlah LPD sudah mencapai 1.439 LPD dari 1.493 jumlah Desa Adat/*Pakraman* yang ada di Bali. Berikut merupakan data sebaran LPD di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 1. 1
Sebaran LPD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah LPD
1.	Kabupaten Badung	122
2.	Kabupaten Bangli	159
3.	Kabupaten Buleleng	169
4.	Kabupaten Gianyar	270
5.	Kabupaten Jembrana	64
6.	Kabupaten Karangasem	190
7.	Kabupaten Klungkung	119
8.	Kabupaten Tabanan	311
9.	Kota Denpasar	35
Jumlah		1.439

Sumber: balisatudata.baliprov.go.id, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, sebaran LPD di setiap Kabupaten di Bali, khususnya di Kabupaten Bangli mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dimana terdapat 159 LPD dari 168 Desa Adat/*Pakraman* yang ada di Kabupaten Bangli. Sebaran LPD di Kabupaten Bangli diantaranya yaitu pada Kecamatan Bangli terdapat 23 LPD, Kecamatan Tembuku terdapat 36 LPD, Kecamatan Susut terdapat 39 LPD, dan Kecamatan Kintamani dengan 61 LPD. Dari 159 LPD yang tersebar di Kabupaten Bangli, jumlah tersebut diklasifikasi menjadi beberapa kategori yaitu 88 LPD yang dikategorikan sehat, 38 LPD yang dikategorikan cukup sehat, 22 LPD dalam kategori kurang sehat, 6 LPD dalam kategori tidak sehat, dan 5 LPD dalam kategori macet atau tidak beroperasi pada tahun 2022.

Dalam menjalankan operasionalnya LPD wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas perekonomian yang telah

berlangsung dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari pelaporan keuangan yang mencakup mengenai informasi posisi keuangan yang relevan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode oleh suatu entitas. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan serta perubahan posisi keuangan yang digunakan oleh pemangku kepentingan saat membuat keputusan ekonomi. Pada dasarnya, laporan keuangan disusun untuk memberitahukan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangan tersebut.

Menurut *Ikatan Akuntan Indonesia* (IAI, 2017) Laporan Keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan yang disajikan oleh suatu Entitas atau Organisasi. Adapun tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan suatu informasi mengenai posisi keuangan yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi. *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 2 tahun 1980 yang menyatakan bahwa terdapat dua kriteria agar laporan keuangan memiliki kualitas dalam penyajiannya, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Lebih jauh *Financial Accounting Standards Board* (FASB) menyatakan bahwa kualitas primer ini terdiri dari *Relevant* dan *Reliable*. Sedangkan kualitas sekunder terdiri dari *Comparable* yang didalamnya termasuk *Consistency*.

Sejalan dengan FASB, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Disini SAK tidak mengklasifikasikan kualitas menjadi primer dan sekunder, tetapi dari pernyataan keduanya memiliki inti yang sama. Berdasarkan FASB dan SAK tersebut diatas,

nampaklah bahwa salah satu unsur atau kriteria penting agar laporan keuangan dapat memiliki kualitas adalah relevan. Yang dimaksud dengan Relevan disini adalah seperti apa yang didefinisikan oleh FASB dalam SFAC No. 2 yaitu: Relevansi suatu informasi akuntansi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Relevan ini meliputi tiga aspek kualitas, yaitu: 1) *Predictive Value* (nilai prediksi), 2) *Feedback Value* (nilai umpan balik) dan 3) *Timeliness* (tepat waktu)".

Kualitas laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan terkait operasional entitas atau organisasi, salah satu entitas yang sangat penting memiliki laporan keuangan yang berkualitas yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dalam menjalankan operasionalnya, LPD wajib membuat laporan keuangan yang relevan yang dilakukan setiap bulannya. Hal tersebut telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 17 yang menyatakan bahwa *Prajuru* LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada *Bendesa* dan LPLPD setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, dan tahunan. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas selama periode satu tahun berjalan. Sedangkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 18 menyatakan bahwa *Prajuru* LPD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku LPD berakhir dalam *Paruman Desa*.

Penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu atau melewati batas maka informasi yang disampaikan tidak relevan untuk digunakan. Informasi yang disampaikan tidak tepat waktu akan mengurangi nilai relevansi laporan keuangan

dan akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin menjadikan suatu informasi menjadi relevan tetapi relevansi informasi akan terjadi jika penyampaian dilakukan dengan tepat waktu (Maharani, 2013). LPD sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang berkembang di wilayah *desa pakraman* di Bali memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas perekonomian yang telah berlangsung serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan koordinator LP-LPD Kabupaten Bangli yaitu Bapak Gusti Ngurah Sandinata S.E menyebutkan bahwa “per Tahun 2023 masih terdapat 11 LPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan. Terdapat 5 LPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan di Kecamatan Bangli, 4 LPD di Kecamatan Kintamani, 1 LPD di Kecamatan Susut, dan 1 LPD di Kecamatan Tembuku”. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan paling banyak terjadi di Kecamatan Bangli dengan 5 LPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga terjadi setiap bulannya, dimana LPD harus menyampaikan laporan keuangan kepada LP-LPD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Koordinator LP-LPD Kabupaten Bangli yaitu Bapak Gusti Ngurah Sandinata S.E menyatakan bahwa “selama awal tahun buku 2024 terdapat 25% LPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dari 154 LPD yang masih beroperasi. 25% LPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan diantaranya terjadi di Kecamatan Bangli 8%, Kecamatan Kintamani 7%, Kecamatan Susut 5%, Kecamatan Tembuku 5%”. Bapak Gusti Ngurah Sandinata S.E juga menyatakan

bahwa “hal tersebut terjadi karena beberapa hal yaitu: situasi dan kondisi di desa adat/*pakraman* seperti adanya upacara besar atau *Piodalan* sehingga LPD tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan, selain itu banyaknya LPD yang belum menggunakan teknologi informasi sehingga banyak LPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan karena masih menggunakan sistem manual, serta sumber daya manusia yang kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya”.

Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu pemahaman akuntansi. Pemahaman akuntansi sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar lebih berkualitas. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi apabila mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan. Semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan suatu lembaga atau organisasi maka diperlukan seseorang dengan tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi pula. Menurut (Sayekti et al., 2023) Semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi seseorang maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga pengelolaan laporan keuangan menjadi efektif. Menurut (Yuliani et al., 2010) rendahnya kualitas laporan keuangan disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau sistem informasi akuntansi keuangan belum diterapkan secara optimal. Dengan tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi akan membantu lembaga atau organisasi untuk terhindar dari kesalahan penyusunan laporan keuangan.

Dipilihnya variabel pemahaman akuntansi sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Bangli karena dengan

pemahaman yang baik mengenai konsep dan prinsip akuntansi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, pegawai LPD di Kecamatan Bangli masih dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa, dan kebanyakan dari pegawai LPD memiliki latar belakang profesi diluar akuntansi. Hasil wawancara dengan kepala LP-LPD Kabupaten Bangli yaitu Bapak Gusti Ngurah Sandinata S.E menyatakan bahwa “rata-rata pegawai LPD merupakan lulusan SMA, meski ada beberapa pegawai yang Sarjana tapi bukan Sarjana Ekonomi khususnya Akuntansi. Kurangnya kemampuan dalam bidang akuntansi dapat memperlambat pembuatan laporan keuangan. Sehingga masih perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan para pegawai LPD.”

Berdasarkan data dari LP-LPD Kabupaten Bangli dimana terdapat 137 pegawai yang tersebar di LPD Kecamatan Bangli 90 diantaranya merupakan lulusan SMA, 20 pegawai lulusan SMK, 17 pegawai merupakan lulusan S1, 7 pegawai merupakan lulusan SMP, 2 pegawai lulusan D1 dan 1 pegawai LPD di Kecamatan Bangli merupakan lulusan S2. Hubungan tingkat pemahaman akuntansi dengan kualitas laporan keuangan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Meliani & Werastuti, 2021) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan koperasi di kabupaten Buleleng artinya semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi maka laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas. Sementara itu hasil penelitian dari (Puteri et al., 2019) dan (Pebriantari & Andayani, 2021) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut (Husna, 2017) teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Perkembangan teknologi saat ini bukanlah hal yang asing, hampir semua orang mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan di suatu instansi sehingga dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Melalui pemanfaatan terhadap teknologi informasi, instansi dapat mengurangi risiko kesalahan manusia serta memastikan keakuratan data transaksi keuangan.

Dipilihnya variabel pemanfaatan teknologi informasi sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Bangli karena dilihat dari manfaat utama yang diberikan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih efisien, akurat dan terpercaya. Berdasarkan wawancara dengan kepala LPD Kabupaten Bangli menjelaskan bahwa “pemanfaatan teknologi informasi di LPD masih kurang, terutama LPD yang terletak di pelosok desa karena sedikitnya fasilitas IT seperti komputer dan jaringan internet”. Sehingga LPD tersebut masih menggunakan cara manual, yang berpotensi memiliki resiko kesalahan pencatatan lebih tinggi, yang nantinya akan berdampak pada akurasi, keandalan dan relevansi informasi dalam laporan keuangan. Sehingga dapat dilihat kendala yang dialami LPD di Kecamatan Bangli terletak pada pemanfaatan teknologi informasi pada perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Dalam penelitian (Sukriani et al., 2018)

dan (Pebriantari & Andayani, 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Harnoni et al., 2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan diterapkannya teknologi informasi, diharapkan LPD dapat menghasilkan output yang semakin baik serta kinerja para karyawannya semakin meningkat.

Selain faktor-faktor tersebut harus didukung pula dengan faktor Budaya serta adat istiadat masyarakat setempat dalam menjalankan sebuah organisasi. Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki ciri khas tersendiri dimana lembaga ini lebih kental akan budaya serta adat istiadat masyarakat Bali. Budaya Tri Hita Karana (THK) merupakan sebuah konsep spiritual, kearifan lokal, sekaligus falsafah hidup masyarakat Hindu Bali yang bertujuan untuk membentuk keselarasan hidup manusia (Suryandari et al., 2021). Adanya konsep Budaya Tri Hita Karana menjadi pedoman berperilaku oleh masyarakat di Bali dimana setiap filosofinya selalu dijaga dan ditaati oleh masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu seperti Parahyangan (hubungan antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa), Pawongan (hubungan antara manusia dengan manusia) dan Palemahan (hubungan manusia dengan alam). Kultur lokal Bali Tri Hita Karana (THK) diadopsi sebagai budaya organisasi dalam penelitian ini. Budaya Tri Hita Karana adalah sebuah filosofi yang sekaligus menjadi konsep kehidupan dan sistem kebudayaan masyarakat Bali. Konsep kehidupan yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, keselarasan, dan keseimbangan antara tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan dan budaya, estetika dan spiritual

(Tenaya, 2007) dalam (Adiputra, 2014). LPD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa adat di Bali. Sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas, LPD harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional.

Budaya Tri Hita Karana dilaksanakan di kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun kelompok. Budaya ini mengedepankan konsep kebersamaan, kerukunan, serta keseimbangan yang tercermin dalam tiga dimensi yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. *Parahyangan* mengajarkan bahwa setiap tindakan, termasuk dalam pengelolaan keuangan, harus dilandasi dengan kejujuran dan tanggung jawab moral. Pengelola LPD yang menghayati nilai Parahyangan cenderung lebih berhati-hati dan etis dalam menyusun laporan keuangan, sehingga meminimalkan peluang manipulasi data atau penyalahgunaan dana. *Pawongan* dalam budaya Tri Hita Karana, yaitu hubungan harmonis dengan sesama menjadi prioritas. Nilai ini mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan, karena pengelola LPD merasa bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat desa adat sebagai pemangku kepentingan utama. *Palemahan* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan, yang tercermin dalam praktik pengelolaan aset LPD. Pelaporan keuangan yang berkualitas menjadi alat untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan komunitas dan lingkungan sekitarnya. Penerapan budaya Tri Hita Karana tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian tetapi dapat melestarikan budaya masyarakat setempat. Dipilihnya variabel tersebut karena

Budaya Tri Hita Karana merupakan Filsafat hidup masyarakat Bali. Konsep ini menekankan prinsip kejujuran, integritas dan moralitas tinggi. Dalam konteks LPD hal ini berarti menyusun serta melaporkan laporan keuangan dengan transparan, jujur dan akurat. Tri Hita Karana merupakan pola keseimbangan serta keserasian hubungan yang harmonis yang tercipta untuk mencapai kesejahteraan hidup. Situasi operasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) disesuaikan dengan kearifan lokal mencerminkan keinginan pemerintah tidak hanya sekedar memajukan perekonomian tetapi juga melestarikan budaya dan seni (kearifan lokal) di Bali (Damayanthi, 2011). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan, 2023) menyatakan bahwa Budaya THK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sanjaya et al., 2019) menyatakan bahwa Variabel Budaya Tri Hita Karana berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan teori keagenan. Teori keagenan menggambarkan adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dalam sebuah organisasi. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan dalam melakukan tugasnya. Informasi yang ada di dalam laporan keuangan dapat menjadi sinyal mengenai kondisi perusahaan bagi para penggunanya. Untuk mengurangi konflik tersebut, laporan keuangan menjadi alat yang penting untuk mengurangi ketegangan antara pemerintah dan masyarakat (Listiani, 2018) dalam (Dwipayana & Sujana, 2024). Teori ini juga menghubungkan antara *agent* yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada *principal* yang berhak menerima atau meminta pertanggungjawaban. Hubungan antara teori ini dengan

variabel pertama yaitu pemahaman akuntansi bahwa individu yang memiliki pemahaman akuntansi yang tinggi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian, *agent* dengan pemahaman akuntansi yang baik dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *principal*.

Hubungan variabel kedua dengan teori keagenan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi meliputi proses pengelompokan, penggolongan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan menjadi laporan keuangan. Informasi ini kemudian digunakan oleh agen dan prinsipal untuk pengambilan keputusan (Sari et al., 2014). Hubungan variabel ketiga dengan teori keagenan yaitu penerapan budaya Tri Hita Karana dalam manajemen perusahaan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara *principal* dan *agent*. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas termasuk pengambilan keputusan dan lingkungan yang tidak pasti seperti perusahaan dalam kondisi *financial distress* (Adiputra, 2014). Dalam kondisi seperti ini diperlukan dasar perilaku yang dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan pekerjaan ataupun pengawasan. Penerapan nilai-nilai budaya Tri Hita Karana dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan etis, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak *agent* dapat tersampaikan dengan baik kepada para *principal*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Meliani & Werastuti, 2021) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi di Kabupaten Buleleng”. Kebaruan dari penelitian ini

yakni penggabungan dari tiga variabel independen dalam menguji kualitas laporan keuangan. Jika pada penelitian yang dilakukan (Meliani & Werastuti, 2021) beliau menggunakan variabel tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel tingkat pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan budaya Tri Hita Karana. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek penelitian yang dijadikan tempat penelitian, (Meliani & Werastuti, 2021) melakukan penelitian yang memfokuskan pada kualitas laporan keuangan Koperasi di Kabupaten Buleleng sedangkan penelitian ini dilakukan di LPD yang lebih mengkaji pada kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Bangli. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Bangli”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat LPD di Kecamatan Bangli yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas perekonomian yang telah berlangsung serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

2. Pemilihan pengurus LPD di Kecamatan Bangli dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa, hal tersebut mengakibatkan minimnya pemahaman pengurus mengenai laporan keuangan karena tidak ahli di bidangnya.
3. Belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut diketahui dari keterbatasan pemahaman, buruknya jaringan serta kurangnya fasilitas yang mendukung.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memberikan fokus penelitian agar permasalahan yang diteliti lebih terarah dan terhindar dari penafsiran yang berbeda. Penulis memfokuskan pada pengumpulan data dan hasil observasi untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman akuntansi pemanfaatan teknologi informasi dan budaya Tri Hita Karana terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan mengambil studi kasus pada LPD Se-Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di LPD se-Kecamatan Bangli?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di LPD se-Kecamatan Bangli?
3. Apakah budaya Tri Hita Karana berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di LPD se-Kecamatan Bangli?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di LPD se-Kecamatan Bangli.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di LPD se-Kecamatan Bangli.
3. Untuk menganalisis pengaruh budaya Tri Hita Karana terhadap kualitas laporan keuangan di LPD se-Kecamatan Bangli.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi serta wawasan yang jelas mengenai akuntansi khususnya pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi, dan budaya Tri Hita Karana terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan juga evaluasi bagi Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) untuk selalu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan tepat waktu.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Sebagai bahan referensi untuk memperbaiki dan memperbarui penelitian-penelitian selanjutnya sehingga kualitas penelitian mahasiswa Undiksha dapat ditingkatkan.

c. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi dan budaya Tri Hita Karana terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD).

